

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Oleh

- 1) Maria Meilyantini Ero Suku
Mahasiswa Program Studi Akuntansi
e-mail: meilyanti887@gmail.com
- 2) Iriany Dewi Soleiman
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail:
- 3) Nuraini Ismail
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: nurainiismail100@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the administrative factors and human resources, planning and documents of procurement of goods and services on budget absorption and also to find out the most dominant influences from administrative and human resource factors, which are found in the National Road Implementation Unit IV Region of NTT Province. . The study population consisted of 36 respondents who held positions in fields related to budget, including: PPK, PUMC, KTU, Technical Staff and Financial Staff (Reporting Officer) Satker, PPSPM, Treasurer, KTU, Planning Engineering Assistant, Supervision Engineering Assistant, in the Unit National Road Implementation Work Region IV NTT Province.

The results of this study use multiple linear regression analysis which aims to determine whether or not there is an independent variable (X) on the dependent variable (Y). The analysis will be used with the help of the SPSS program. If analyzed, the t value of the planning document is 5.229 and t table is 2.03951, meaning that It can be seen that t is the planning document $>$ t is the planning document table. Furthermore, it can also be seen that the t count of administrative records is 2.433 $>$ t table 2.03951, then it can be seen that the t count of HR competency is -0.987 $<$ t table 2.03951, it is also seen that the t count of procurement documents is 0.345 $<$ t table 2.03951, so it can be said that there are planning document variables and variables Administrative recording has a significant effect on budget absorption, while HR Competency Variables and Procurement Document Variables partially do not have an effect on budget absorption.

The suggestion that can be given to the NTT Province National Road Implementation Unit IV in Ende is that the Institution / Ministry / Satker continues to pay attention to and optimize the absorption of the budget carried out every budget year through planning factors, administrative records, HR competence and procurement documents. From the four factors listed above, it is necessary to do so in order to determine their effect on the absorption of the budget, both partially and simultaneously on the absorption of the budget.

Keywords: Budget Absorption, Planning Documents, Administrative Records, Human Resources Competence, Procurement Documents

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dalam mengelola perekonomian negara, dimana kebijakan fiskal merupakan satu-satunya instrumen yang berada dalam kendali sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga mencerminkan tiga fungsi pokok pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi lokasi dan fungsi distribusi.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam menggerakkan roda perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah, yang pada hakikatnya mencerminkan kebijakan pemerintah itu sendiri, dengan tujuan menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam struktur APBN, pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi dan fasilitas umum lainnya. Namun komposisi APBN yang telah disusun selama ini masih belum cukup memadai untuk menciptakan pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk juga dalam mendorong kegiatan ekonomi. Komposisi alokasi sektor belanja pada struktur APBN menunjukkan masih didominasi oleh belanja pegawai, cicilan pokok bunga hutang, dan subsidi energi.

Reformasi Keuangan Negara di Indonesia, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran, harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang menitik berat kepada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran belanja, realisasi atau penyerapan anggaran belum sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan atau yang ditetapkan, artinya pada saat ini di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT mengalami penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran yang rendah ini disebabkan karena tidak dijalankan program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesainya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 pasal 3 menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.

Rencana pemecahan masalah adalah apakah faktor perencanaan, faktor pencatatan administrasi, faktor kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor perencanaan, faktor pencatatan administrasi, faktor kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Stakeholder

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed (Ulum, 2017) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu. Para pemegang saham, para *supplier*, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder*, yang berarti pemerintah harus melaksanakan perannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam

sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintah hanyalah merupakan cerminan dari pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah terdiri dari :

a. Anggaran dan Penganggaran

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

b. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UUAPBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini assosiatif. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan, Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis faktor, uji hipotesis. Variabel dan indikatornya adalah:

- a. Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang berisi kegiatan perencanaan program kerja beserta informasi didalamnya yang dapat dioperasionalkan dalam penganggaran. Indikator: anggaran kegiatan, penetapan SK Panitia lelang, penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, pengesahan dokumen pengumuman lelang, DIPA yang perlu direvisi pelaksanaan kegiatan.
- b. Pencatatan Administrasi adalah kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Indikator :penentuan akun, waktu penyusunan dan penelaahan anggaran, pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikasi, pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran dan pagu anggaran.
- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dalam menyiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan dana sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran. Indikator: kompetensi sumber daya manusia pelaksana pengadaan, tugas dalam panitia pengadaan, kompensasi yang diterima dan risiko yang dihadapi.
- d. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang berkaitan dengan informasi tentang pengerjaan proyek yang diumumkan kepada kontraktor/rekanan. Indikator penentuan harga perkiraan sendiri, penandatanganan kontrak, addendum kontrak, mutasi pegawai/pejabat pengelola keuangan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.1.1 Uji Validitas

Nilai r hitung (Person Correlation) untuk keseluruhan item yakni Y sebesar 0,810, X_1 sebesar 0,707, X_2 sebesar 0,886, X_3 sebesar 0,803, dan X_4 sebesar 0,743 nilainya lebih besar dari 0,3, dengan demikian seluruh variabel penelitian ini adalah valid.

4.1.2 Uji Reabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai 0,7 maka instrumen yang digunakan reliabel.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Nilai sig untuk keseluruhan item yakni Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0,067, perencanaan (X_1) sebesar 0,347, Pencatatan Adminstrasi (X_2) sebesar 0,140, Kompeten SDM (X_3) sebesar 0,583, dan Dokumen Pengadaan (X_4) sebesar 0,061 nilainya lebih besar dari 0,05, dengan demikian seluruh variabel penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas untuk seluruh variabel tidak ada memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan tidak ada memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian model regresi pada persamaan ini bebas dari masalah multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Semua variabel independen menunjukkan nilai sig > dari 0.05 sehingga data ini tidak menunjukkan terjadinya heterokedastisitas atau model regresinya bersifat homokedastisitas.

4.3 Hasil Analisis Faktor

Nilai MSA pada baris *Anti Image Correlation* dengan tanda "a". Menunjukkan bahwa variabel Y nilai sebesar 0,662, X_1 nilainya sebesar 0,661, X_2 nilainya sebesar 0,733, X_3 nilainya 0,763 dan X_4 nilainya 0.840. memenuhi persyaratan komunitas

yaitu lebih besar dari 0,50, dengan demikian semua variabel mempunyai korelasi yang signifikan.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Uji t

- a. Nilai sig untuk pengaruh variabel perencanaan (X1) terhadap variabel Penyerapan Anggaran (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,229 > 2.03951$, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh perencanaan (X1) terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa 1 diterima yakni ada pengaruh positif antara dokumen perencanaan dengan penyerapan anggaran. Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kuswoyo (2011), Priatno (2013), Herriyanto (2012). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri,CT (2014).
- b. Nilai sig untuk pengaruh Pencatatan Administrasi (X2) terhadap Penyerapan Anggaran (Y) adalah $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,433 > 2.03951$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa 2 diterima yakni ada pengaruh positif antara Pencatatan Administrasi (X2) terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herriyanto (2012). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri,CT (2014).
- c. Nilai sig untuk pengaruh variabel Kompetensi SDM (X3) terhadap variabel Penyerapan Anggaran (Y) adalah $0,331 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,987 < 2.03951$, sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh Kompetensi SDM (X3) terhadap Penyerapan Anggaran (Y), hal ini berarti Kompetensi SDM pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT tidak mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi sehingga tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa 3 berbeda atau tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), Putri,CT (2014).
- d. Nilai sig untuk pengaruh variabel Dokumen Pengadaan (X4) terhadap variabel Penyerapan Anggaran (Y) adalah $0,732 > 0,05$ dan nilai t hitung $0.345 <$

2.03951, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak pengaruh Dokumen Pengadaan (X4) terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian pada hipotesa 4 ini berbeda atau tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), Putri, CT (2014).

4.4.2 Uji F

Nilai signifikansi berpengaruh terhadap variabel X1, X2, X3 dan X4 secara simultan terhadap Y adalah $0,000 < 0,005$ dan nilai F hitung $16,017 > 2,67$, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh terhadap Dokumen Perencanaan (X1), Pencatatan Administrasi (X2), Kompetensi SDM (X3) dan Dokumen Pengadaan (X4) secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Dengan demikian model ini mendukung model penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), Putri CT (2014) dan Priatno (2013).

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R Square sebesar 0,674 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel Dokumen Perencanaan (X1), Pencatatan Administrasi (X2), Kompetensi SDM (X3) dan Dokumen Pengadaan (X4) secara simultan terhadap variabel Penyerapan Anggaran (Y) adalah sebesar 67,4 %, dengan demikian sisanya sebesar 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Dokumen perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dimana nilai sig adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan baik atau buruknya dokumen perencanaan yang disajikan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi. NTT akan mempengaruhi penyerapan anggaran.
2. Pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dimana nilai sig adalah 0,021 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT akan mempengaruhi penyerapan anggaran.
3. Kompetensi sumber daya manusia secara parsial (sendiri) tidak mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran dimana sig adalah 0,331 (lebih besar dari 0,05)
4. Dokumen pengadaan secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap

penyerapan anggaran dimana sig 0,732 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan baik buruknya dokumen pengadaan yang disajikan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

5. Variabel perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan Secara simultan (bersamaan) berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian variabel-variabel tersebut dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT dimana F hitung (16,017) yang lebih besar dari F tabel (2,67).

5.2 Saran

1. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Herryanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta* (Doctoral dissertation, Thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Priatno, P. A., & Khusaini, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).
- Setyawan, A. (2017). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Tovani, A. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Di Indonesia Periode Tahun 2009–2013*. Journal Of Accounting, 1(1).

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) - Maria Meilyantini Ero Suku, Iriany Dewi Soleiman, Nuraini Ismail

- Ulum, I. (2017). *INTELLECTUAL CAPITAL: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. UMMPress.
- Renggo, Y. R. (2013). *Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Human Development Index (Hdi) di Indonesia*. JURNAL TRANSFORMATIF UNKRISWINA SUMBA, 2(2), 1-16.
- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3(8), 458-477.
- Yulianti, E. (2015). *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Grand Fatma Hotel di Tenggara Kutai Kartanegara*. E-Jurnal Administrasi Bisnis, 3(4), 900-910.